



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Koordinasi Lintas Lembaga di Kabupaten Garut

Imas Sumiati¹, Rismawati²

¹Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, doktorimas24@gmail.com

²Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, rismawati00171@gmail.com

Corresponding Author: rismawati00171@gmail.com²

Abstract: *This study aims to discuss the coordination between the Regional Representative Council (DPRD) and Regional Apparatus Organizations (OPD) in Garut Regency in following up on community aspirations, which still faces a major problem, namely the ineffectiveness of the existing coordination mechanism. Community aspirations conveyed through DPRD hearings often do not receive optimal follow-up, leading to public dissatisfaction. However, the results of the study show that the implementation of coordination still faces various obstacles, particularly budget constraints, differences in program priorities, weak communication, and the absence of standard operating procedures (SOPs) governing the follow-up of hearing results. The research results reveal three themes: inter-agency coordination mechanisms, local government governance, and human resource competency management, as well as 10 categories: formal coordination processes, technical field processes, planning and evaluation, communication and collaboration, government institutional systems, government oversight systems, reporting administration, human resource competencies, human resource development, and soft leadership skills. 120 codes. This research used a qualitative method with a narrative approach. Data was obtained through in-depth interviews with the secretariat DPRD secretariat, department heads, DPRD staff, and OPD staff, and reinforced with meeting documentation and official reports. Data analysis was conducted thematically to identify coordination patterns, emerging obstacles, and efforts undertaken by both institutions in*

Keywords: *Communication, Reporting, Budget, Transparency, Coordination*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas Koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat masih menghadapi permasalahan utama, yaitu belum efektifnya mekanisme koordinasi yang ada. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui audiensi DPRD seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas program, lemahnya komunikasi, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) baku yang mengatur tindak lanjut hasil audiensi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa ditemukan 3 *thema* meliputi: mekanisme koordinasi lintas lembaga, tata Kelola pemerintahan daerah, manajemen

kompetensi SDM, 10 kategori meliputi: proses koordinasi formal, proses teknis lapangan, perencanaan dan evaluasi, komunikasi dan kolaborasi, sistem lembaga pemerintahan, sistem pengawasan pemerintahan, administrasi pelaporan, kompetensi SDM, pengembangan SDM, soft skill kepemimpinan. 120 *code*. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Naratif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seketariat DPRD, kabag, staff DPRD dan staff OPD, dan diperkuat dengan dokumentasi rapat serta laporan resmi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan pola koordinasi, hambatan yang muncul, serta usaha yang dilakukan kedua lembaga dalam mengatasinya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Atlas.ti versi 9.

Kata Kunci: Komunikasi, Pelaporan, Anggaran, Transparansi, Koordinasi

PENDAHULUAN

Koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat masih menghadapi permasalahan utama, yaitu belum efektifnya mekanisme koordinasi yang ada. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui audiensi DPRD seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik koordinasi. Keterbatasan anggaran daerah seringkali menjadi kendala dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara optimal. Di sisi lain, perencanaan yang tidak sinkron dengan kebutuhan aktual membuat hasil koordinasi kurang tepat sasaran. Komunikasi yang kurang terstruktur antara DPRD, sekretariat, dan OPD semakin memperlemah alur koordinasi, ditambah dengan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) baku dalam pelaporan maupun tindak lanjut audiensi. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan koordinasi berjalan secara bagian, tidak konsisten, dan kurang responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Kabupaten Garut, dengan karakteristik geografis yang cukup luas dan populasi yang heterogen, menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompleksitas kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menuntut koordinasi lintas lembaga yang efektif dan terintegrasi. Namun, keterbatasan anggaran daerah dan ketidaksinkronan perencanaan dengan kebutuhan aktual semakin memperlemah efektivitas koordinasi. Faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan penting, di mana kurangnya kapasitas dalam analisis kebijakan, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi menghambat proses koordinasi yang optimal.

Pelaksanaan audiensi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang berjalan selama ini masih bersifat informal dan tidak konsisten. Ketiadaan standar baku dalam pelaporan, tindak lanjut, maupun evaluasi membuat hasil audiensi sering berhenti pada tataran wacana tanpa kejelasan implementasi.

Konsekuensinya, berbagai persoalan yang telah diangkat masyarakat melalui DPRD tidak memperoleh penyelesaian yang memadai. Situasi ini semakin diperburuk dengan ketiadaan forum khusus maupun mekanisme diskusi terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil cenderung bersifat sektoral dan parsial, sehingga kurang mampu menghadirkan solusi komprehensif bagi kepentingan masyarakat luas.

Praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi antara DPRD dan OPD merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Pengalaman di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa meskipun telah ada mekanisme koordinasi melalui rapat kerja, audiensi, dan pelaporan, efektivitasnya masih terbatas. Hambatan yang muncul antara lain komunikasi yang belum terstruktur, sistem pelaporan

yang kurang memadai, serta minimnya pelatihan bagi staf. Selain itu, keterbatasan anggaran, ketidaksinkronan perencanaan, dan lemahnya tindak lanjut di lapangan semakin memperlemah kualitas koordinasi lintas lembaga.

Dengan melihat kondisi di atas, jelas bahwa koordinasi lintas lembaga di Kabupaten Garut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi utama bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa koordinasi yang terarah, aspirasi masyarakat berpotensi tidak terakomodasi, kebijakan publik tidak berjalan efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dapat melemah. Sebaliknya, jika koordinasi diperkuat melalui regulasi, sistem informasi, komunikasi yang baik, serta dukungan SDM yang kompeten, maka DPRD Kabupaten Garut dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Koordinasi Lintas Lembaga dalam menindak lanjuti Audiensi di Kabupaten Garut dalam rangka penelitian “Koordinasi Lintas Lembaga di Kabupaten Garut”

METODE

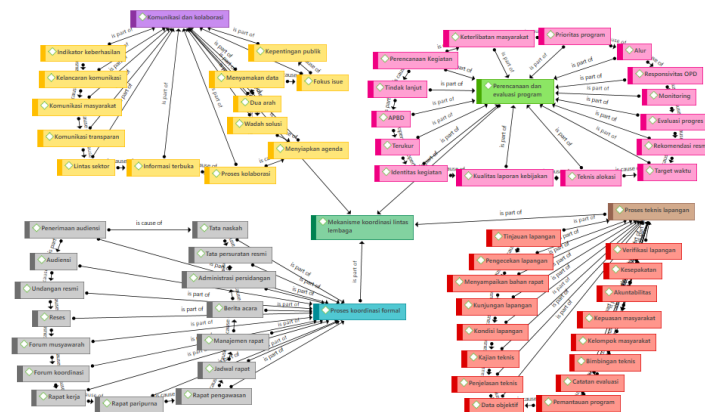
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan proses ilmiah untuk memperoleh data yang relevan di dalam proses penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dijadikan sebagai kaidah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, dan dapat teruji secara ilmiah, dengan berdasarkan pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Pendekatan naratif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita, pengalaman, dan narasi hidup subjek penelitian.

Teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: Studi Kepustakaan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis model interaktif. Yaitu sebagai berikut: (1) Reduksi Data, yang meliputi memo dan transkrip, n.d, (2017) Penyajian Data, yang meliputi koding dan kategorisasi data: (3) Penarikan Kesimpulan, dengan menggunakan bantuan alat bantu software Atlas TI Versi 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Atlas T.I Versi 9. Hal ini meliputi langkah-langkah, yaitu sebagai berikut coding data, menentukan kategori, dan menentukan tema. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan hasil riset ini menjadi 3 thema, 10 Kategori, 120 code secara keseluruhan. Tema tersebut diantaranya meliputi: mekanisme koordinasi lintas lembaga, tata kelola pemerintahan daerah, manajemen kompetensi SDM.

1. Mekanisme Koordinasi Lintas Lembaga



Gambar 1. Thema Mekanisme Koordinasi Lintas Lembaga

Tema pertama adalah Mekanisme koordinasi lintas lembaga Sistem mekanisme koordinasi lintas Lembaga adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhandengan adanya mekanisme koordinasi lintas Lembaga akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi” (Manullang, 2008:72).

Proses koordinasi formal dalam kegiatan teknis lapangan dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, setiap hasil audiensi masyarakat ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan bersama camat dan kepala desa untuk memverifikasi kondisi nyata. Kegiatan ini bertujuan memastikan tindak lanjut aspirasi masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengecekan dijadikan bahan evaluasi dalam rapat tindak lanjut untuk menentukan apakah suatu kegiatan layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

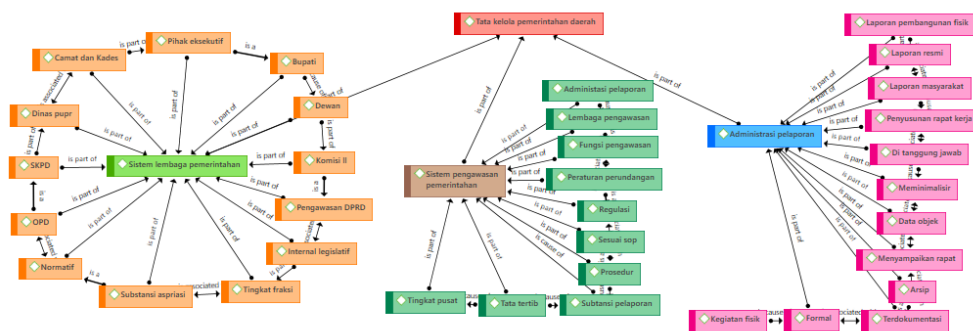
Proses teknis lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara langsung di lokasi (lapangan) untuk memperoleh data, informasi, atau memastikan kebenaran suatu kondisi yang sedang diteliti, dipantau, atau diverifikasi. setiap hasil audiensi diproses melalui pengecekan lapangan bersama camat dan kepala desa untuk memverifikasi kebenaran lapangan kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa tindak lanjut aspirasi Masyarakat benar-benar sesuai kondisi nyata dan dapat dipertanggung jawabkan. pengawasan di lapangan menjadi dasar evaluasi penting dalam menentukan keberlanjutan program. hasil pengecekan lapangan dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kegiatan layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Dengan demikian, proses teknis lapangan memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah.

Perencanaan dan evaluasi program adalah dua proses penting dalam manajemen pemerintahan yang saling berkaitan. Perencanaan berfungsi untuk menyusun tujuan, langkah kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan agar program berjalan sesuai sasaran. Proses perencanaan dan evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komunikasi dan kolaborasi merupakan dua unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Komunikasi berperan untuk menyampaikan informasi dan menyatukan pemahaman antar lembaga, sedangkan kolaborasi adalah kerja sama terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemerintahan daerah, keduanya saling mendukung dalam

memperkuat koordinasi antara DPRD, OPD, dan masyarakat agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan publik. dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, di mana setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat akan diverifikasi dan ditindaklanjuti bersama antara DPRD dan OPD. tetapi juga bentuk akuntabilitas bersama dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan transparan, partisipatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Thema tata kelola pemerintahan daerah



Gambar 2. Thema Tata kelola pemerintahan daerah

Tema kedua adalah tata kelola pemerintahan daerah. Tata kelola pemerintahan daerah merupakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Prinsip tata kelola ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, tanggung jawab publik, dan koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

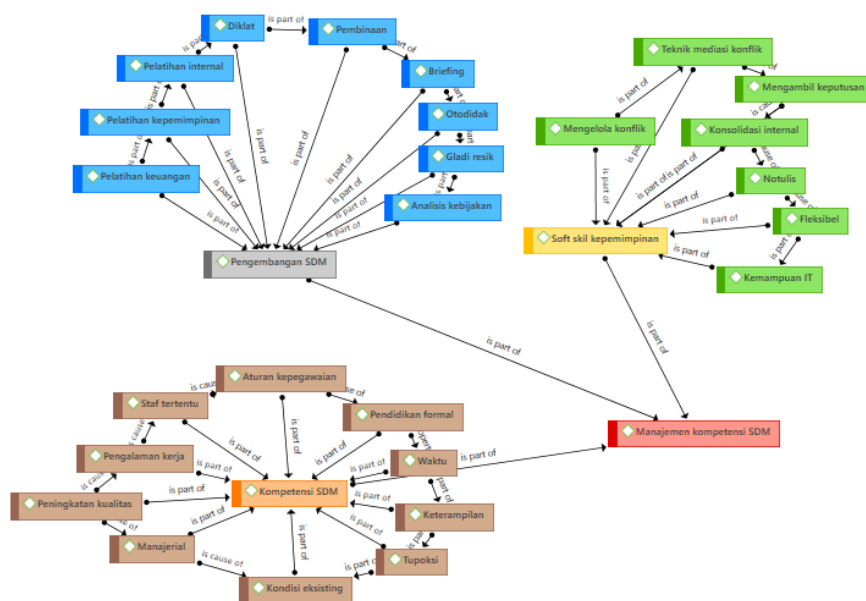
Menurut UNDP (1997), tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance mencakup tiga unsur utama, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, tata kelola yang baik diwujudkan melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan publik.

Sistem lembaga pemerintahan daerah merupakan pola hubungan kerja antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan OPD sebagai pelaksana teknis pemerintahan. Sistem ini berfungsi mengatur koordinasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik agar pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sistem lembaga pemerintahan daerah dijalankan melalui hubungan koordinatif antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan OPD sebagai pelaksana teknis pemerintahan daerah. Mekanisme kerja ini dilaksanakan melalui rapat kerja, audiensi, serta komunikasi langsung antara komisi DPRD dan OPD untuk membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Sistem pengawasan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut telah berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan, di mana DPRD berperan aktif memastikan pelaksanaan program pemerintah tetap akuntabel dan selaras dengan kepentingan masyarakat sistem lembaga pemerintahan daerah merupakan pola hubungan kerja antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan OPD sebagai pelaksana teknis pemerintahan. Sistem ini berfungsi mengatur koordinasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik agar pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Administrasi pelaporan merupakan proses penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Dalam pemerintahan daerah, pelaporan ini berfungsi memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian hasil kerja dengan rencana pembangunan. administrasi pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh setiap OPD dan disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja penyusunan laporan dilakukan melalui koordinasi lintas bidang di lingkungan Bappeda untuk memastikan kesesuaian antara hasil kegiatan di lapangan dan data administrasi yang dilaporkan.

3. Tema Manajemen Kompetensi SDM



Gambar 3. Thema manajemen kompetensi SDM

Thema ketiga adalah Manajemen kompetensi SDM adalah proses pengelolaan dan pengembangan kemampuan pegawai agar memiliki kualitas dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui manajemen kompetensi, instansi dapat mengidentifikasi, mengukur, serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan produktif.

Manajemen kompetensi SDM adalah proses pengelolaan dan pengembangan kemampuan pegawai agar memiliki kualitas dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui manajemen kompetensi, instansi dapat mengidentifikasi, mengukur, serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan produktif.

Kompetensi SDM memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor seperti aturan kepegawaian, pendidikan formal, tupoksi, kemampuan manajerial, serta pengalaman kerja yang berperan dalam membentuk kualitas pegawai. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui program diklat dan pelatihan kepemimpinan yang bertujuan memperkuat kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah di lingkungan kerja. Pembinaan internal dilakukan secara periodik untuk menjaga keseragaman pemahaman antar staf serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan kepegawaian dan tupoksi masing-masing pegawai.

Pengembangan SDM merupakan upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pegawai agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan diklat, pelatihan teknis, dan pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Kegiatan pelatihan dan pembinaan tersebut dievaluasi melalui umpan balik kinerja untuk menilai efektivitas peningkatan kompetensi dan dampaknya terhadap kualitas hasil kerja.

Soft Skill Kepemimpinan merupakan kemampuan nonteknis yang berhubungan dengan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan membangun hubungan kerja yang efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, soft skill kepemimpinan berperan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif, terutama dalam mengarahkan, memotivasi, serta menyelesaikan masalah di antara pegawai. efektivitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang jelas dan mampu memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan tugas antar lembaga, sebagaimana dijelaskan dalam. Kepemimpinan yang kuat memastikan setiap tindak lanjut kebijakan dapat berjalan secara terarah dan efisien. Pengembangan soft skill kepemimpinan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang membekali pegawai dengan kemampuan menyelesaikan masalah, mengelola konflik, serta mengambil keputusan yang tepat dalam konteks kerja lintas lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mekanisme koordinasi lintas lembaga antara DPRD dan OPD di Kabupaten Garut merupakan faktor utama dalam efektivitas pelaksanaan program dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, forum audiensi, serta kunjungan lapangan sebagai sarana komunikasi dan sinkronisasi kebijakan. Diperlukan komunikasi lintas lembaga yang lebih intensif dan sistem koordinasi yang terjadwal agar proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan terarah.

1. Proses koordinasi formal pelaksanaan koordinasi formal dilakukan melalui rapat paripurna, rapat dengar pendapat, dan forum musyawarah. Mekanisme ini berfungsi sebagai wadah resmi penyampaian aspirasi masyarakat serta sarana pembahasan kebijakan daerah.
2. Proses teknis lapangan selain forum formal, koordinasi juga dilakukan secara langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan camat, kepala desa, dan tim teknis OPD untuk melakukan pengecekan kondisi faktual terhadap aspirasi masyarakat. Hasil tinjauan menjadi dasar pengambilan keputusan di DPRD.
3. Perencanaan dan evaluasi setiap hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan dan digunakan untuk perencanaan serta evaluasi program berikutnya. Proses evaluasi masih bersifat insidental, tetapi menjadi sarana penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan koordinasi di lapangan.
4. Komunikasi dan kolaborasi komunikasi antar lembaga berperan penting dalam keberhasilan koordinasi. Hubungan yang intensif antara DPRD dan OPD membantu mempercepat tindak lanjut aspirasi masyarakat. Namun, komunikasi informal masih perlu diperkuat agar kolaborasi lebih efisien dan responsif.

Thema Tata Kelola Pemerintahan daerah berperan penting dalam menjaga efektivitas koordinasi antara DPRD dan OPD di Kabupaten Garut. Tata kelola yang baik tercermin melalui keterbukaan informasi, sistem pelaporan yang tertib, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja. meskipun koordinasi sudah berjalan, masih ditemukan kendala dalam integrasi sistem antar lembaga dan pelaksanaan pengawasan yang belum konsisten.

1. Sistem lembaga pemerintahan Struktur organisasi dan pembagian tugas antar lembaga sudah berjalan sesuai aturan, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Diperlukan penyelarasan fungsi antar instansi agar koordinasi lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
2. Sistem pengawasan pemerintahan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit, monitoring, dan pelaporan hasil kerja. DPRD berperan dalam pengawasan kebijakan, sedangkan OPD melakukan pengawasan teknis. Namun mekanisme pengawasan masih terbatas karena belum adanya indikator kinerja yang terukur.
3. Administrasi pelaporan laporan hasil koordinasi menjadi alat utama dalam menilai kinerja lembaga. Akan tetapi, pelaporan masih dilakukan secara manual dan belum berbasis sistem digital yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan tindak lanjut.

Thema Manajemen Kompetensi SDM Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa manajemen kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung efektivitas koordinasi antara DPRD dan OPD. Pegawai yang memiliki kemampuan teknis, komunikasi, dan sikap profesional mampu memperlancar pelaksanaan program serta penyaluran aspirasi masyarakat. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam analisis kebijakan, penyusunan laporan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan dan bimbingan teknis telah dilakukan, namun masih bersifat sementara dan belum berkelanjutan.

1. Kompetensi SDM pegawai DPRD dan OPD masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan teknis, seperti analisis kebijakan, penyusunan laporan, dan komunikasi publik. Hal ini menyebabkan tindak lanjut aspirasi masyarakat belum sepenuhnya optimal.
2. Pengembangan SDM Pelatihan bagi pegawai telah dilakukan namun belum berkelanjutan. Diperlukan program pengembangan kompetensi yang sistematis agar pegawai memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang sesuai kebutuhan koordinasi lintas lembaga.
3. Soft skill kepemimpinan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja koordinasi. Pemimpin yang komunikatif dan mampu membangun kerja sama lintas sektor dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

REFERENSI

- Spencer, Lyle M. dan Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons
- UNDP (United Nations Development Programme). 1997. *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, R. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Mathis, Robert L., & Jackson, John H. *Human Resource Management = Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-10 (atau edisi lain), Salemba Empat, Jakarta.
- Super, D. E. (1980). *A life-span, life-space approach to career development*. *Journal of vocational behavior*, 16(3), 282-298.
- Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51-64.
- Handyaningrat, R. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Audina, Nandini, Ike Rachmawati, and Dian Purwanti. "Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi." *Jurnal Papatung* 2.2 (2019): 28-38.